



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagaimana amanat tersebut Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat disusun berdasarkan RPMD Kota Batam Periode 2016-2021.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran yang strategis dalam Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan juga Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan Pelayanan dan Penanganan yang mampu mengurangi Permasalahan Sosial sehingga mampu membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS/Fakir Miskin.

Peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial sangat penting, baik dari



pengurangan segi jumlahnya sebagai Penyandang Masalah maupun dalam pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatnya, serta dalam meningkatkan kemampuan dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi setiap Keluarganya.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Keberadaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bukan berarti tanpa masalah, tetapi justru semakin maju suatu Daerah/Kota maka kemungkinan besar permasalahan Sosial yang akan timbul juga akan meningkat, Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam, Data dari 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalamnya termasuk Fakir Miskin, sampai dengan Tahun 2016 berjumlah lebih kurang; 53.850 RTS/Jiwa (41.768 RTS, dan 12.082 Jiwa), data tersebut sebagai dasar dalam memberikan Pelayanan dan penanganan, Permasalahan tersebut dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir miskin, dan pemberdayaan Masyarakat, Selain permasalahan teknis juga dikarenakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat masih belum bisa melaksanakan penanganan dan pelayanan secara baik. Sehingga upaya perbaikan terhadap Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota



Batam Tahun 2016 - 2021 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan Penanganan PMKS di Kota Batam. Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk periode lima (5) tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dilakukan dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun sebelumnya (periode 2011-2016), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan normatif yang di jadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabelitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

20. Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dan Perda RPJPD Provinsi Kepri.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
23. Perda Nomor: 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021;
24. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kota Batam;
25. Peraturan Walikota Batam Nomor, 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Organisasi perangkat daerah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra OPD ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Penjabaran dari RPJMD Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bersifat Indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disusun dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholders pembangunan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.



2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
4. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Memberikan acuan dalam pembinaan dan penanganan fakir miskin, Rehabilitasi sosial, Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.
6. Mewujudkan produktivitas dan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam upaya pemenuhan Kebutuhan dasarnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis,

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat Tabel penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.
- b. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;



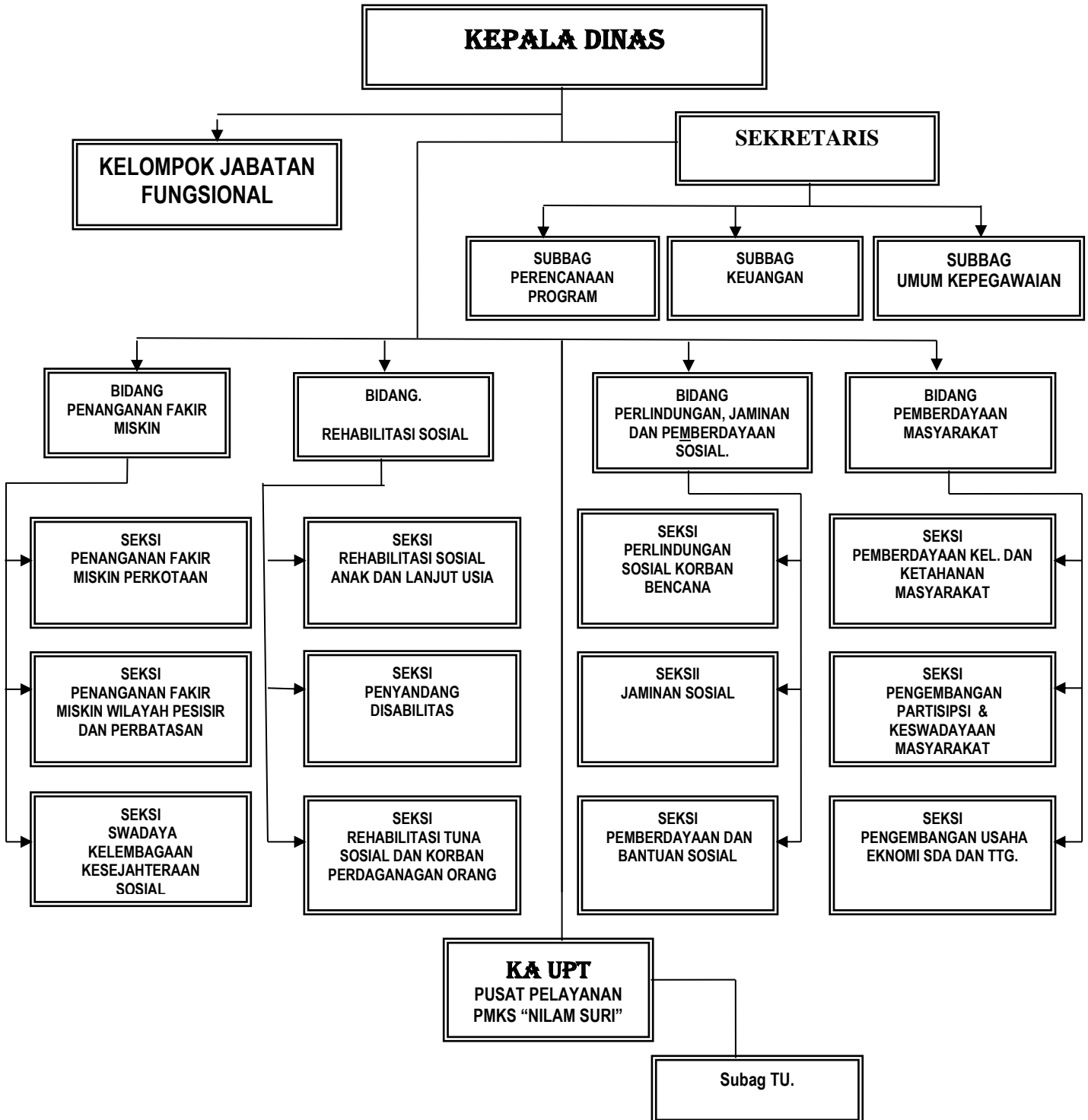
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi Bidang, Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas;
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam merupakan OPD penggabungan dari yang serumpun yang sebelumnya merupakan salah satu bidang pada Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam., maka bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi bahagian tugas pokok dan fungsi yang berada pada OPD Dinas Sosial yang di gabung menjadi "**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**" Kota Batam, sehingga OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terdiri dari :

- a. Sekretariat/Sekretaris
- b. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- f. UPT "Pusat Pelayanan PMKS Nilam Suri" Kota Batam.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
PERDA NO. 10 TAHUN 2016**





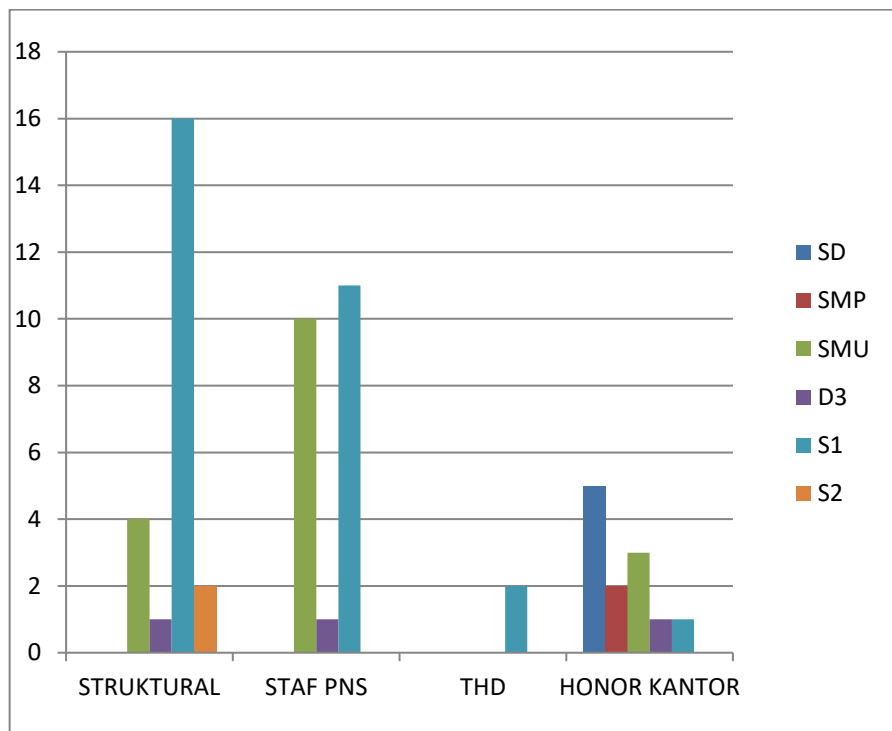
2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2016, didukung oleh personel/SDM sebanyak 59 Orang, sebagaimana tergambar pada Grafik 2 dan 3 sebagai berikut, :

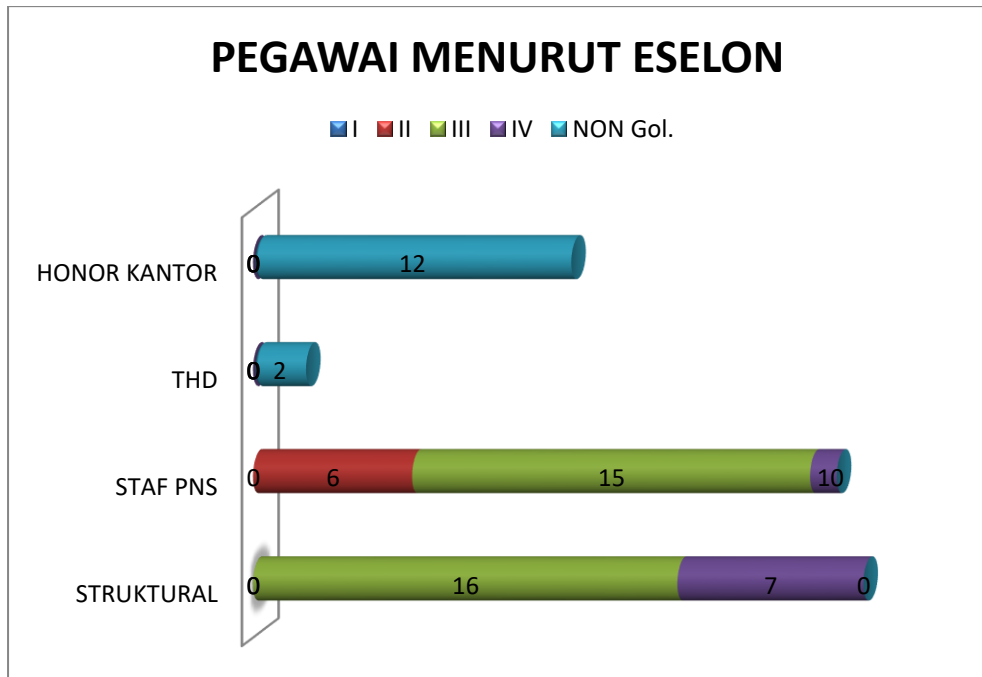
Grafik 1. Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

MENURUT PENDIDIKAN



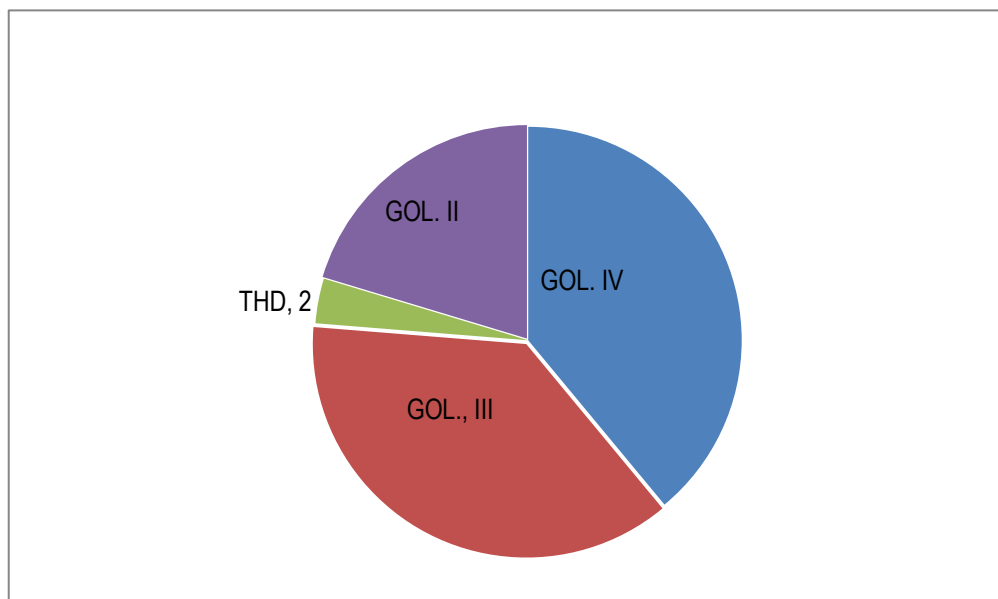
Grafik2.Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

MENURUT ESELON



Grafik 3.Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

MENURUT GOLONGAN RUANG



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor antara lain sebagai berikut ;

a. Tabel Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Satuan	Jumlah/ Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah	M2		10,434.351,007
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	Unit	2	1,336,872,461,35
3.	Gedung/ Bangunan Aulla/Ruang Isolasi	Unit	1	-
4.	Taman Makam Pahlawan "Bulan Gebang" Batam	Ha	2	-
5.	Gedung Pusat Pelayanan PMKS "Nilam Suri"	Komplek	1	6,300,000,000
6.	Kendaraan Roda 4	Unit	6	626,200,000
7.	Kendaraan Roda 6	Unit	4	702,355,000
8.	Kendaraan Roda 2	Unit	12	46,735,000
9.	Peralatan & Perlengkapan Kantor lainnya	Unit	963	1,092,728,182
10.	DII			-
Jumlah				19,919,303,650.35

2.3 Kinerja Pelayanan ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kondisi Pelayan OPD saat ini, Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, selama lima tahun dapat dilihat sebagaimana berikut :

1). Data Penanganan terhadap PMKS

Secara rinci capaian kinerja dilihat pada tabel berikut.

No	Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal	Target RPJMD 2015	Capaian					Capaian s/d Tahun 2015	Status Capaian	SKPD
					2011	2012	2013	2014	2015			
1	Jumlah rumah yang di renovasi (RTLH)	Rumah	3000	5762	100	428	696	816	747	5.787	tercapai	Dinsos
2	Jumlah anak panti yang dibantu	Jiwa	1.184	3959	816	246	2.529	-	-	4.775	tercapai	Dinsos
3	Jumlah korban bencana yang ditangani	Jiwa	850	8.500	1.150	685	5.430	4.601	305	11.871	tercapai	Dinsos
4	Jumlah Lansia terlanjar yang di bina	Jiwa	300	850	-	-	50	200	300	850	tercapai	Dinsos
5	Jumlah orang terlanjar dan korban Tindak kekerasan dan pekerja migran	Jiwa	500	1.025	63	125	131	118	80	1.017	Tidak tercapai	Dinsos
6	Jumlah PMKS yang diberi keterampilan	Jiwa	100	340	30	30	60	100	120	440	tercapai	Dinsos
7	Jumlah PKH.	RTS	6573	3680	-	3.053	3.402	3.660	3.172	3.660	Tidak tercapai	Dinsos
8	Jumlah penyandang cacat yang di bantu	Jiwa	566	752	21	81	51	61	51	831	tercapai	Dinsos

2) Data Rencana Penanganan terhadap PMKS
(Bidang Ressos) tahun 2016 -2021.

URAIAN (Jenis PMKS)	SATUAN	Data Tahun		
		2014	2015	2016
Anak Balita Terlantar	Jiwa/Org	-	-	120
Anak Terlantar	Jiwa/Org	-	-	200
ABH	Jiwa/Org	-	-	50
Anak Jalanan	Jiwa/Org	-	-	200
Anak dengan Disabilitas	Jiwa/Org	-	-	500
Anak yang menjadi Korban tidak Kekerasan	Jiwa/Org	-	-	100
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jiwa/Org	-	-	100
Lanjut Usia terlantar	Jiwa/Org	-	-	600
Penyandang Disabilitas	Jiwa/Org	-	-	1000
Tuna Susila	Jiwa/Org	-	-	1300
Gelandangan	Jiwa/Org	-	-	50
Pengemis	Jiwa/Org	-	-	1000
Kelompok Minoritas	Jiwa/Org	-	-	200
BWBLP	Jiwa/Org	-	-	150
Orang dengan HIV/Aids (ODHA)	Jiwa/Org	-	-	700
Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa/Org	-	-	1000
Korban Trafficking	Jiwa/Org	-	-	500
Jumlah PMKS (Bidang Rehabilitasi Sosial).....				7.770

- 3). Data Rencana Penanganan terhadap PMKS (Bidang Penanganan Fakir Miskin) Tahun 2016 – 2021.

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
Pemulung	Jiwa/Org	-	-	350
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa/Org	-	-	515
Fakir Miskin (BDT 2015)	Jiwa/Org	-	-	39.903
Keluarga bermasalah sosial Psikologis	Jiwa/Org	-	-	1.000
Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-
Jumlah PMKS. (Bidang Pemberdayaan Sosial)...				41.768

- 4). a. Data Penanganan terhadap PMKS (Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2016-2021.

URAIAN	SATUAN	REALISASI			
		2013	2014	2015	2016
Korban Tidak Kekerasan (org terlantar)	Jiwa/Org	-	-	-	100
Pekerja Migran bermasalah sosial	Jiwa/Org	-	-	-	700
Korban Bencana Alam	Jiwa/Org	-	-	-	3000
Korban Bencana Sosial	Jiwa/Org	-	-	-	512
Jumlah PMKS (Bidang Perlindungan , Jamsos					4.312

b. Jumlah dan Sebaran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2016.

NO	KECAMATAN	JENIS KELEMBAGAAN					KET.
		KT/TAGANA	PSM	TKSK	ORSOS/YAYASAN	PANTI ASUHAN	
1	Sekupang	7/24	5	1	14	13	
2	Lubuk Baja	5/4	2	1	22	2	
3	Batu Ampar	4/7	4	1	7	2	
4	Bengkong	4/7	4	1	3	6	
5	Batam Kota	6/8	1	1	24	14	
6	Batu Aji	4/12	4	1	6	7	
7	Sagulung	6/1	4	1	12	16	
8	Sei Beduk	4/6	3	1	5	3	
9	Nongsa	5/2	5	1	8	7	
10	Blp. Padang	5/3	4	1	7	1	
11	Bulang	4/0	4	1	1	-	
12	Galang	4/0	1	1	1	1	
	J U M L A H	58/74	41	12	110	72	

5) a. Data Rincian Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2014.

No.	Kecamatan	Quota	Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV	
			L	TL	L	TL	L	TL	L	TL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Batam Kota	271	68	203	68	203	68	203	68	203
2	Batu Aji	676	294	282	395	281	393	283	391	285
3	Belakang Padang	491	198	293	198	193	198	293	190	301
4	Bulang	649	430	219	429	220	429	220	424	225
5	Galang	1087	521	566	522	565	512	575	495	592
6	Lubuk Baja	290	193	137	153	137	152	138	152	138
7	Nongsa	418	206	212	202	216	201	217	199	219
8	Sagulung	1099	446	653	443	656	441	658	419	680
9	Sei Beduk	877	370	507	369	508	367	510	360	517
10	Sekupang	289	95	194	95	194	95	194	94	195
11	Batu Ampar	426	274	152	274	152	273	154	266	160
	Total	6573	3155	3418	3148	3425	3128	3445	3058	3515

b'. Jumlah Komponen PKH yang di miliki RTSM pada Tahun 2014.

No.	c Periode	Bumil	Balita	ANAK SD	ANAK SMP	ANAK SMA	TOTAL PEMBAYARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tahap I Th 2014	130	2349	3811	1295	-	1,213,125,000
2	Tahap II Th. 2014	136	2321	3711	1322	-	1,958,139,000
3	Tahap III Th. 2014	137	2319	3706	1338	-	1,203,375,000
4	Tahap IV Th. 2014	111	2035	3685	1442	-	1,180,050,000
Total		533	10239	15024	5004	-	5,554,689,000

c. Komponen PKH yang di miliki RTSM Pada Tahun 2015

No.	Periode	Bumil	Balita	ANAK SD	SMP	ANAK SMA	TOTAL PEMBAYARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tahap I Th. 2015	127	2179	3811	1533	-	1,215,252,000
2	Tahap II Th. 2015	115	2075	3711	1502	645	3,033,627,500
3	Tahap III Th. 2015	113	2029	3706	1520	672	1,278,857,500
4	Tahap IV Th. 2015	110	2812	3685	1779	343	1,316,900,000
Total		533	10239	15024	5004	-	6,754,637,500

c. Jumlah Komponen PKH yang di miliki RTSM Pada Tahun 2016

No.	Periode	Bumil	Balita	ANAK SD	ANAK SMP	ANAK SMA	TOTAL PEMBAYARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tahap I Th. 2016	97	1759	4119	1739	727	3,105,226,250
2	Tahap II Th. 2016	99	1769	4078	1699	753	1,409,057,500
3	Tahap III Th. 2016	94	1774	4069	1696	754	1,395,846,250
4	Tahap IV Th. 2016	181	3945	11390	5292	2657	1,432,485,000
Total		-	-	-	-	-	7,342,615,000
Total terima tahun 2014 s/d 2016						-	35,719,507,750

- 7) Data Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED - SP) dan LPM.

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
UEDSP	Kelurahan	44	44	44
LPM	Kelurahan	64	64	64

Sebagaimana Tabel diatas bahwa perkembangan pencapaian Kinerja Penanganan PMKS, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, sesuai dengan data yang tersedia menunjukkan kecenderungan kinerja yang dicapai adalah baik. Hal ini terlihat dari kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut tidak dapat di pungkiri di lapangan masih ada kesenjangan-kesenjangan bagi PMKS. Hal ini di karenakan arus Urbanisasi ke Kota Batam yang cukup tinggi, sementara lapangan pekerjaan yang ada bukan bertambah melainkan justru berkurang maka permasalahan sosial pun masih tinggi, sehingga dalam pelayanan masih belum dapat optimal untuk mendorong kemandirian baik bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan tingkat partisipasi Potensi Sumber kesejahteraan Sosial dalam penanganan terhadap PMKS dan tumbuh kembangnya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kegiatan di masa mendatang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Adapun Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompentensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Tenaga Penyuluh Sosial, dan para pekerja-pekerja sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan pencapaian target 100 % diperlukan alokasi dana yang tidak sedikit, dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau masih terbatas untuk Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batam.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah (Contoh : Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, anak punk, waria) sehingga penanganan yang sudah di lakukan orang sudah bergeser ke tempat yang lain sementara pendatang baru masuk menjadi masalah baru kembali, dan begitu seterusnya. Di sisi lain partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam membantu Pembangunan bidang Sosial.

Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya struktur yang terintegrasi. Dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam merupakan badan pemerintah daerah yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan, elaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan bagi PSKS dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Adanya partisipasi aktif Potensi sumber kesejahteraan sosial seperti karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pelopor, para Pekerja Sosial, dan organisasi sosial lainnya yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi dan koordinasi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, di Kota Batam
3. Dukungan pihak-pihak terkait, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam memiliki pegawai yang sebagian kurang berkompeten dalam bidang Pekerjaan Sosial sehingga perlu mengembangkan jaringan kerjasama baik dengan Lembaga Perguruan Tinggi Kesejahteraan Sosial, dengan Lembaga-lembaga Diklat Peksos di bawah Kementerian Sosial, bekerjasama dalam memberikan bantuan pada pelatihan-pelatihan baik yang di adakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di selenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut diatas.

Strategi yang digunakan Kementerian Sosial dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan kepedulian sosial, dan pranata gotong royong.
2. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya.
3. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa.
4. Peningkatan kepercayaan antar warga dan pencegahan diskriminasi.



5. Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu tingkat kabupaten/kota, untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas.
6. Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.
8. Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat.
9. Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial.
10. Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan CSR.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1 Analisa Permasalahan

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

saat ini mempunyai beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompentensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.

2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau, APBN masih terbatas untuk melakukan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah (Contoh : Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, anak punk, waria) sehingga penanganan yang sudah dilakukan orang sudah bergeser ke tempat yang lain sementara pendatang baru masuk menjadi masalah baru kembali, dan begitu seterusnya. Disisi lain partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam Pembangunan Bidang Sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat yang berada di Kota Batam terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*),

dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kota Batam telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam lima pilar intervensi masih sangat terbatas,
2. Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih ada yang tumpang tindih satu sama lain,
3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Kota Batam, yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran masih terbatas,
4. Peran pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pelayanan Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,



6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
8. Pemberdayaan terhadap Masyarakat masih belum maksimal, sehingga mbelum terdayagunakan secara optimal
9. Pemberdayaan terhadap kelembagaan keluarahan dalam pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum memadai.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 bahwa pemerintah kota Batam akan mewujudkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam Sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Visi Kota Batam :

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Misi Kota Batam;

1. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.* Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang



- penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
2. *Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera.* Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.
 3. *Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.* Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.
 4. *Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.* Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang

- kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.
5. *Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.* Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.
 6. *Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.* Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehinggamasyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekati pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.



Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, akan melaksanakan Misi kedua, adalah;

“Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya”.

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, adalah melakukan Penanganan dan Pemberdayaan terhadap PMKS dengan beberapa sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mendorong upaya Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Meminimalisir terhadap berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari sebanyak 26 jenis yang terdiri dari; anak Balita terlantar, anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan disabilitas, Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, gelandangan, pengemis, pemulung, Kelompok minoritas, Bekas Warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP), Orang dengan



HIV/AIDS (ODHA), Korban penyalahgunaan NAPZA, Korban perdagangan Orang, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja migran bermasalah sosial, Korban bencana Alam/Sosial, Perempuan rawan sosial ekonomi, Fakir miskin, Keluarga bermasalah Sosial Psikologis;

4. Mendorong dan Memberdayakan bagi PMKS sehingga dapat hidup mandiri dan layak di tengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan Sosial dalam delapan strategis, yakni :
 - a. kemiskinan (atau kefakir miskinan),
 - b. kecacatan,
 - c. ketelantaran,
 - d. ketunaan sosial,
 - e. keterasingan,
 - f. korban bencana,
 - g. korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi,
 - h. Pemberdayaan masyarakat

TABEL : 3.1.1
MISI, TUJUAN, SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN RPJMD KOTA BATAM PERIODE 2016-2021

MISI (2)	TUJUAN (7)	SASARAN	URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
"Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera".	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Sosial	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kepulauan Riau dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kota Batam ke Propinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya secara nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Kota Batam dengan Provinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Kota Batam sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2016-2021 dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran baik ditingkat Kelurahan, kecamatan dan kota. Tujuan selanjutnya dapat Mensejahterakan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Umumnya.

TABEL 3.1.2
PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT
DAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN KOTA BATAM,

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Capaian Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penanganan dan Pemberdayaan sosial terhadap PMKS	Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial terhadap PMKS terutama Fakir miskin / Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.	meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainya dalam Pemenuhan kebutuhan dasar.
2	Jumlah Bantuan yang diberikan	Terlindungi dan Terjaminnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Perlindungan, jaminan sosial dan pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Jaminan maupun perlindungan Sosial terhadap PMKS.
		Terehabilitasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan baik;	Meningkatnya pelayanan, penanganan dalam merehabilitasi terhadap PMKS	Meningkatnya pelaksanaan Rehabilitasi terhadap PMKS
3	Jumlah Peran serta dan Partisipasi Masyarakat / Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat /Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan PMKS.	Meningkatnya partisipasi Kelembagaan Sosial dalam Penanganan terhadap PMKS.	Meningkatnya kemampuan Orsos / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam kapasitasnya terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4	Jumlah Kapasitas Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga kemasyarakatan,	Kemandirian lembaga kemasyarakatan,.
5	Prosentase Swadaya Masyarakat	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Mendorong peningkatan terhadap swadaya Masyarakat.	Kemampuan terhadap swadaya masyarakat

6	Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas lembaga ekonomi kelurahan	Mendorong kemampuan kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan	Kemampuan meningkatkan kapasitas dan ekonomi secara mandiri;
---	--	--	---	--

3.2 Isu-isu Strategis.

Sesuai dengan analisa permasalahan dan perbandingan atas capaian kinerja sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan Renstra Propinsi dan Kementerian maka terdapat beberapa permasalahan yang mendasar yang harus dipecahkan agar pencapaian tujuan lima tahun kedepan dapat lebih baik. Adapun isu-isu yang penting untuk dipecahkan adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mewujudkan hidup mandiri.
2. Masih rendahnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu memberikan Pelayanan dan penanganan terhadap PMKS
3. Masih rendahnya Pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi dalam membangun kelurahan.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dan bagaimana cara memberdayakan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Pemberdayaan Masyarakat pada Umumnya. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

“ Terwujudnya pelayanan sosial yang prima dalam pembangunan kesejahteraan sosial ”

1. Visi

Adapun ***makna dari Visi*** sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Sosial mengandung arti usaha melayani kebutuhan orang lain sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan total pelayanan sosial (*total social services*) yang dinamis, sensitif, dan komprehensif.
- b. Pelayanan Sosial juga dapat diartikan terbentuknya sistem pelayanan terhadap pemenuhan akan kebutuhan dan pengembangan sosial untuk masing-masing individu, sehingga mereka mampu melakukan penyesuaian otomatis terhadap perubahan sosial yang sangat cepat, sambil meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai hak azasi universal.
- c. Prima adalah sangat baik/utama, mengandung arti bahwa dalam pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu penanganan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab

tumbuh kembangnya permasalahan sosial dimaksud dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

- d. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Misi,

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menetapkan **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui penanganan fakir Miskin, rehabilitasi sosial, Perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial.
2. Mengembangkan prakarsa dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keberdayaan lembaga kemasyarakatan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis di bidang Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial, dan pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mewujudkan visi dan misi periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam tahun 2016-2021 adalah:

- a. Memberdayakan, Melindungi dan memberikan Jaminan Sosial terhadap, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- b. Terwujudnya aksesibilitas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan social dasar, penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- c. Terjaminnya penyandang Disabilitas berat dan disabilitas ganda, lanjut usia non potensial, eks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- d. Memantapkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan organisasi serta

peningkatan peran aktif masyarakat dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Organisasi dalam pemberdayaan masyarakat
2. Tercapainya pemahaman kelembagaan dan organisasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, adalah sebagaimana Tabel dibawah.

TABEL : 4.2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya penanganan dan pemberdayaan sosial terhadap PMKS.;
		Terehabilitasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan baik ;
		Terlindungi dan terjaminya PMKS.;
		Meningkatnya peran serta dan partisipasi Masyarakat/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan terhadap PMKS.;
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya swadaya Masyarakat

	Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan.
--	---

4.3 Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis sesuai peran Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat, maka dilakukan analisa SWOT (*strength, Weakness, Opportunities dan Threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat tercapai. Adapun Analisa SWOT adalah sebagai berikut :

**TABEL : 4.3.1
ANALISA SWOT**

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNNITY)	ANCAMAN (THREATS)
		a. Adanya struktur yang terintegrasi. b. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, c. Tersedianya akses ke Tingkat Pusat. d. Kemandirian & meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PMKS e. Dukungan pihak-pihak terkait.
KEKUATAN (STRENGHT)	(SO)	(ST)
a. Struktur Organisasi yang mendukung b. Potensi Pegawai yang tinggi, c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, d. Tersedianya Anggaran yang cukup,	a. Meningkatkan pengembangan usaha kepada PMKS (fakir miskin) melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) b. Meningkatnya akses serta fasilitas yang dapat di rasakan oleh PMKS.	a. Meningkatkan SDM Pegawai dan juga terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui, Peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat. b. Melaksanakan semua kesepakatan dan MOU yang telah dibuat melalui Rakor dengan lembaga/instansi terkait. c. Melakukan koordinasi lintas sector melalui Kunker. d. Menyediakan/Mapping data PMKS

			dan PSKS.
	KELEMAHAN (WEAKNESS)	(WO)	(WT)
	<p>a. Minimnya Jumlah dan kemampuan pegawai/PSKS yang memahami Permasalahan Sosial yang ada,</p> <p>b. Kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas belum memadai.</p> <p>c. Belum ter - updatenya data base PMKS</p> <p>d. Partisipasi bagi Dunia Usaha masih rendah.</p>	<p>a. Meningkatkan Pemberdayaan terhadap Pegawai/PSKS melalui Bimbingan keterampilan atau Peningkatan kapasitas berkenaan dengan masalah Sosial.</p> <p>b. Meningkatkan dan pengembangan pemberdayaan PMKS/masyarakat terutama Pesisir, perbatasan /hinterland dalam upaya kemandirian dan peningkatan kesejahteraan hidup.</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas SDM pegawai dan PSKS yang aktif dan profesional;</p> <p>b. Meningkatkan dan mengembangkan potensi SDM dan partisipasi PSKS secara komprehensif.</p>
No.	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata.	Program Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
2	Meningkatkan Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan.	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

1.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

TABEL. V.1.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF
Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial terhadap PMKS/Fakir Miskin		
Verifikasi dan Validasi Data PMKS	Terlaksananya verifikasi dan validasi data (PMKS)	PMKS/ Masyarakat Tidak mampu (miskin)	
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni wilayah Perkotaan	Jumlah Rumah yang dapat di Rehabilitasi		
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni wilayah Pesisir dan Perbatasan	Jumlah Rumah yang dapat di Rehabilitasi		
Fasilitasi Program Bantuan pangan Non Tunai	Jumlah masyarakat tidak mampu yang memperoleh bantuan beras sejahtera		
Bimbingan dan bantuan Kelompok Usaha Bersama KUBE/ UEP wilayah Perkotaan	Jumlah masyarakat tidak mampu wilayah perkotaan yang memperoleh bantuan.		

Bimbingan dan bantuan Kelompok Usaha Bersama KUBE/ UEP wilayah Pesisir dan perbatasan.	Jumlah masyarakat tidak mampu wilayah pesisir dan perbatasan yang memperoleh bantuan.		
Pelayanan Sosial bagi Anak dan lanjut Usia	Terehabilitasinya PMKS dengan baik		
Bimbingan dan Keterampilan PMKS	Terehabilitasinya PMKS dengan baik		
Pengendalian dan Pengawasan PMKS	Terehabilitasinya PMKS (Gepeng, anak Pungk, PSK, Waria) dengan baik		
Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas	Terehabilitasinya PMKS (disabilitas/cacat) dengan baik		
Penguatan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya pendampingan penyaluran bantuan bagi peserta program keluarga harapan		
Bantuan Pemulangan Orang Terlantar dan Korban tindak Kekerasan	Terlindungi dan terjaminnya PMKS (Orang terlantar dan Korban tindak kekerasan)		
Sosialisasi dan Asistensi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDBS)	Terlindungi dan terjaminnya masyarakat / PMKS		
Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs X)	Terlindungi dan terjaminnya PMKS (Orang terlantar)		
Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat Bencana.	Terlaksananya perlindungan bagi korban bencana baik alam maupun sosial		
Pembangunan Gudang Bencana	Tersedianya Fasilitas Penyimpanan barang-barang Bencana (Logistik)		
Peningkatan kapasitas dan Bimbingan Manajemen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya bimbingan teknis bagi pendamping sosial kegiatan penanganan PMKS.		
Bimbingan dan Penguatan Akreditasi Lembaga	Terakreditasinya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak		

Kesejahteraan Sosial Anak (LKKSA)	(LKSA).		
Bimbingan dan Pemantapan bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi anggota TAGANA		
Penyuluhan Sosial	Terlaksananya Penyuluhan terhadap Masyarakat berkenaan dengan PMKS dan PSKS.		
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan Partisipasi masyarakat			
Pembinaan Lembaga dan Organisasi masyarakat	Terlaksananya kapasitas Lembaga Organisasi Kemasyarakatan	1. Masyarakat 2. Kelembagaan Kelurahan	
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota Batam	Meningkatnya swadaya Masyarakat		
Penyelenggaraan dan desiminasi Informasi bagi masyarakat	Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi Kelurahan		

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan penetapan indikator Kinerja masing-masing OPD di dalam RPJMD Kota Batam periode 2016 - 2021 maka untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, ditetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

TABEL : VI.1

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
Prosentase (Jumlah) Rumah Tangga Sasaran (RTS)	100 % /12 . 36.103.	100 % /12 . 36.103	100 % /12 . 39.903	100 % /12 . 39.903.	100 % /12 39.903	100 % /12 39.903	100 % /12 39.903
Jumlah Lembaga (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	294	156	250	265	279	294	294
Prosentase Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan Jiwa (yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial)	100 % 36.103	100 % 36.103	100 % 36.103	100 % 39.903	100 % 36.103	100 % 39.903	100 % 39.903
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS (yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial);	8.197	8.197	12.082	12.082	12.082	12.082	12.082
Jumlah Organisasi (PKK, LPM, Posyandu, RT, RW, KPM, Kader siaga aktif)	77, 77, 450, 315,772,	77, 77, 500, 320, 256	77, 77, 600, 320, 512	77, 77, 650, 320, 512	77, 77, 650, 320, 512	77, 77, 700, 320, 640,	77, 77, 700, 320, 640,
Prosentase swadaya Masyarakat	30 % (2000)	35 % (500)	40 % (500)	45% (500)	50% (500)	50% (500)	50% (2000)



Jumlah Organisasi; (UEM-SP, Posyantek, TTG.);	10, 9, 31,	7, 7, 100	10, 2, 7, 250	10, 2, 7, 250	10, 2, 7, 250	9, 2, 7, 250	49, 9, 35,1100
---	------------	-----------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

BAB VII PENUTUP

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategi (Rensra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam tahun 2016-2021 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan diatas guna mewujudkan visi :

“Terwujudnya Pelayanan Sosial yang Prima dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”

serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam untuk periode berjalan yakni tahun 2011-2016

Selanjutnya, Rensra Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, agar dapat selaras dengan visi Kota Batam yaitu: ***“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”***



Renstra ini telah selesai kami susun, namun dalam penyusunan masih banyak kekurangan baik narasi maupun penyusunan kalimat-perkalimat jadi masih jauh dari sempurna, untuk itu jika ada sesuai yang kurang pada tempatnya mohon kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Demikian disampaikan seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan maupun penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan : Di Batam
Pada tanggal, : Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Sosia Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

HASYIMAH, M.M
Nip. 19630607 198606 2 003

Lampiran

Rencana Strategi Tahun 2016 - 2021

*Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam*

